



# KONSTRUKSI INDONESIA

Media Informasi & Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Edisi 3 Tahun 2016



## TINGKATKAN SDM KONSTRUKSI

**BERITA UTAMA**

**7**

**PENINJAUAN PEMBANGUNAN  
MRT dan Paket Proyek Jalan Layang**

**LIPUTAN KHUSUS**

**10**

**MTU HARAPAN UNTUK BANTU  
Entaskan Kemiskinan di Bali**

**BERITA TERKINI**

**16**

**BIMBINGAN TEKNIS DAN SERTIFIKASI Ahli  
Manajemen Konstruksi**

Sebagai makhluk hidup, manusia memerlukan makan. Tidak sembarang makan, manusia memerlukan makanan yang lengkap, baik rasa maupun jenisnya. Untuk menghasilkannya diperlukan langkah-langkah, diawali dengan perencanaan, pemilihan bahan masakan yang berkualitas dilanjutkan dengan kemampuan memasak yang handal agar bahan masakan dapat diolah menjadi masakan yang lezat.

Demikian pula dalam suatu pekerjaan konstruksi, dibutuhkan perencanaan yang matang dalam membuat penyelenggaraan proyek konstruksi tersebut, ketersediaan bahan material dan alat konstruksi juga harus ditunjang dengan kemampuan tenaga ahli dan terampil konstruksi yang mumpuni.

Hal inilah yang akan terus diupayakan semaksimal mungkin oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR agar sektor jasa konstruksi dari hulu hingga hilir berjalan dengan baik dan berkualitas.

Untuk itu, tim redaksi sudah merangkum beberapa berita terkait capaian dunia Konstruksi di Indonesia, terutama pada lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, pada edisi 4 tahun 2016 kali ini, diantaranya :

Kerjasama Kementerian PUPR dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja ahli/ insinyur. Kerjasama/Nota Kesepahaman yang ditanda tangani Menteri PUPR dengan Menteri Ristek Dikti ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program pemagangan pada proyek konstruksi Kementerian PUPR. Sehingga mereka dapat memiliki pengalaman langsung bekerja pada proyek konstruksi dan mengaplikasikan pelajarannya langsung di lapangan.

Ditjen Bina Konstruksi juga terus berupaya meningkatkan jumlah tenaga terampil (tukang

sebagai ujung tombak pembangunan konstruksi dengan melakukan uji kompetensi dan sertifikasi menggunakan Mobile Training Unit (MTU), seperti beberapa waktu lalu Dirjen Bina Konstruksi menyerah terimakan MTU kepada Pemerintah Provinsi/Kota Denpasar, Bali dan diterima langsung oleh Gubernur Provinsi Bali.

Sebelumnya, Ditjen Bina Konstruksi menyerah terimakan MTU kepada Pemerintah provinsi Yogyakarta, dan beberapa waktu lalu dilakukan Pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan melakukan Pembekalan dan Uji Sertifikasi tukang kayu dan tukang batu menggunakan MTU di desa Nglipar, Gunung Kidul, Yogyakarta oleh Pusat Informasi Pengembang Permukiman & Bangunan.

Tidak hanya konsen dalam meningkatkan sertifikasi tenaga konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi juga turut berkonsentrasi dalam pembentukan kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2016-2020, dimana saat ini sudah mencapai tahap Rapat Kelompok Unsur dan melakukan penyeleksian di beberapa Kota di Indonesia. Continuing Professional Development (CPD) adalah hal patut diketahui pula seiring dengan telah dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dalam Edisi 4 ini juga pembaca dapat melihat perkembangan proyek MRT Jakarta, karena beberapa waktu lalu Tim dari Ditjen Bina Konstruksi melakukan peninjauan terhadap proyek konstruksi yang dilakukan di tengah jalan Ibukota, Jakarta tersebut. Artikel MRA, Penguatan Manajemen Mutu LSP, dan Kantor Baru Balai Jasa Konstruksi Makassar juga dapat menjadi suguhan ringan para pembaca.

Semoga Informasi yang diberikan Tim dapat bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sekaligus membuka mata masyarakat terhadap Kerja Nyata yang dilakukan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Selamat Membaca !



**Pembina/Pelindung:**  
Direktur Jenderal Bina Konstruksi

**Dewan Redaksi:**  
Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi;  
Direktur Bina Investasi Infrastruktur;  
Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;  
Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;  
Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;  
Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan.

**Pemimpin Umum:**  
Hambali

**Pemimpin Redaksi:**  
Kristinawati Pratiwi Hadi

**Penyunting / Editor:**  
Dendy Rahadian  
Kunthi Adinegoro  
Indri Eka Lestari

**Redaksi Sekretariat:**  
Anik Dwi Wahyuningsih  
Agus Raharyo,  
Budiarso Kusumawardono,  
Vita Puspitasari,  
Dicky Rinaldi

**Administrasi dan Distribusi:**  
M. Aldenny  
Merti Kristina Bastari  
Agus Firngadi

**Desain dan Tata Letak:**  
Dagu Komunika

**Fotografer:**  
Sri Bagus Herutomo

**Alamat Redaksi:**  
Gedung Utama Lt. 10  
Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan  
Tlp/Fax : 021-72797847  
E-Mail :  
hukumdatakompu.djbk@gmail.com

## edisi ini

### BERITA UTAMA

- 3 Tingkatkan SDM Konstruksi Kementerian PUPR Bekerjasama dengan Kemenristekdikti
- 5 Rapat Kelompok Unsur Perdana dalam Perjalanan Panjang Mencari Pengurus Lembaga Periode 2016-2020
- 7 Peninjauan Pembangunan MRT dan Paket Proyek Jalan Layang
- 8 Peninjauan Pembangunan MRT dan Paket Proyek Jalan Layang Ciledug-Tendean

### LIPUTAN KHUSUS

- 10 MTU Harapan untuk Bantu Entaskan Kemiskinan di Bali
- 12 Ditjen Bina Konstruksi Uji Kompetensi

Tukang Batu dan Tukang Kayu dengan Menggunakan MTU di Gunung Kidul, Yogyakarta

- 14 Continuing Professional Development, Jaminan Profesionalisme Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia

### BERITA TERKINI

- 16 Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Manajemen Konstruksi
- 18 Sosialisasi dan Pendaftaran ASEAN MRA On Engineering Services and ASEAN MRA On Architectural Services.
- 20 Kerja Sama Bidang Konstruksi Antara Kementerian PUPR, Kemenristekdikti

dan BNSP dalam Rangka Penguatan Manajemen Mutu LSP Politeknik di Seluruh Indonesia

- 22 Balai Jasa Konstruksi Makassar: Kantor Baru Semangat Baru untuk Pembinaan Konstruksi

### LAPORAN KHUSUS

- 24 Bimtek SMK3 Mendukung terciptanya Konstruksi Indonesia yang Handal
- 26 Manajemen Risiko Sebagai Key Driver Iklim Investasi Infrastruktur
- 30 Pentingnya Bimtek SMK3 Bagi Pengguna dan Penyedia

# Tingkatkan SDM Konstruksi KEMENTERIAN PUPR BEKERJASAMA DENGAN KEMENRISTEKDIKTI

Indri Eka Lestari & Dendi Rahadian



Presiden Joko Widodo memiliki kebijakan dalam mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin pemerataan kesejahteraan dan konektivitas di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini bukan hanya sekedar mimpi, dalam program kabinet kerja atau biasa disebut dengan Nawacita, jelas mengisyaratkan bahwa perekonomian Indonesia harus di dorong lebih cepat, dan Infrastruktur

adalah salah satu untuk mendorong pergerakan percepatan ekonomi NKRI.

Sebagai salah satu wakil pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan rumah sebagai alat kemakmuran rakyat untuk menegakkan keadilan dan memajukan seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia belum didukung oleh kesiapan jasa konstruksi nasional,

termasuk tenaga kerja konstruksi yang berkompeten dan handal.

Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, pada pasal 9 yang mengatakan bahwa tenaga kerja sektor konstruksi harus bersertifikat, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu dalam meningkatkan proses percepatan pembangunan infrastruktur ini. Untuk itu, Kementerian PUPR tidak dapat berjalan sendirian, diperlukan dukungan berbagai

pihak terkait, seperti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek dikti) dalam menghasilkan SDM Ahli khususnya Insinyur berkualitas.

Dalam upaya menghasilkan SDM ahli khususnya Insinyur berkualitas, beberapa waktu lalu, (19/08) bertempat di Kementerian PUPR dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Program profesi Insinyur, sesuai dengan amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, Kementerian PUPR akan menyiapkan *training draw* dan Kemenristek Dikti akan menyiapkan kurikulum dan dosen pengajarnya. "Misalkan saja kita (Kementerian PUPR) pada 2016 ini ada 12.000 lebih paket besar dan itu bisa dipakai untuk *training draw* yang bisa digunakan para pelaku yang sedang menempuh pendidikan professional." Ungkapnya

Dengan adanya *training draw*, kami berharap tidak menyulitkan, terutama yang sedang melaksanakan pendidikan, karena terdapat perbedaan antara yang menempuh



menyongsong terhadap kebutuhan insinyur di Indonesia dan insinyur professional dalam hal ini," ucapnya.

Pada saat ini tenaga ahli konstruksi yang telah bersertifikat sebanyak 153.690

tenaga fungsional dari Kementerian PUPR.

Selain itu, Kementerian PUPR memberikan kesempatan pemagangan bagi peserta didik/mahasiswa program profesi insinyur pada paket pekerjaan Kementerian PUPR, yang pada tahun 2016 mencapai 12.164 paket kontraktual, dengan diantaranya 4.193 paket fisik di atas Rp 1 Milyar, belum termasuk paket-paket besar Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Kementerian PUPR, yang akan terus meningkat pada tahun berikutnya.

Kementerian PUPR selaku Pembina

Jasa Konstruksi akan menindaklanjuti kesepakatan ini melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersama Kementerian Riset dan Dikti melalui Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi beserta para Rektor yang telah menerima mandat. Nota Kesepahaman ini dibuat karena kebutuhan akan jasa konstruksi khususnya profesi Insinyur sebagai sumber daya manusia (SDM) yang siap pakai untuk menunjang pembangunan infrastruktur di Indonesia sehingga diharapkan lahir tenaga insinyur berkualitas yang berkontribusi maksimal dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. ■



pendidikan Sarjana (S1) dengan profesional. "Karena yang profesional lebih banyak di lapangannya," ujar Basuki.

Menristek Dikti, Mohamad Nasir mengatakan, sesuai UU Nomor 11/2014 tentang Keinsinyuran ini memang diperlukan suatu peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan undang-undang tersebut. "Karena (PP) dapat mengoperasionalkan tentang profesi keinsinyuran tersebut," ucapnya.

Menurutnya, Kemenristek Dikti telah menyiapkan dan memberikan mandat kepada 40 perguruan tinggi tentang pendidikan profesi keinsinyuran. "Ini merupakan hal yang penting sekali untuk

orang (data LPJKN, Mei 2016). Sementara itu dari data PII (Persatuan Insinyur Indonesia) disebutkan bahwa Indonesia kekurangan 120.000 insinyur hingga tahun 2019, hal ini terjadi seiring kian pesatnya pembangunan yang dilakukan di era pemerintahan saat ini.

Dalam kerjasama ini, Kementerian Ristek Dikti menetapkan pedoman teknis pembelajaran dan pemagangan Program Profesi Insinyur serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Profesi Insinyur. Sedangkan Kementerian PUPR pada Program Profesi Insinyur profesional sebagai dosen atau fasilitator yang berasal dari tenaga ahli kontraktor, konsultan, maupun



**Tantangan jasa konstruksi ke depan yang akan dihadapi oleh Pengurus Lembaga Periode 2016-2020 akan lebih berat**

# Rapat Kelompok Unsur Perdana dalam Perjalanan Panjang Mencari Pengurus Lembaga Periode 2016-2020 yang Kompeten dan Berintegritas

Nurasih Asriningtyas

Sejalan dengan upaya memberikan ruang kepada masyarakat jasa konstruksi untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan jasa konstruksi, Pemerintah melalui amanat Undang-undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999, Pasal 31 ayat 3 dengan jelas menyatakan bahwa penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri (Lembaga). Sesuai dengan PP No. 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Selanjutnya tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja LPJK diatur dalam peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Masa bakti Pengurus LPJK Periode 2011-2015 sudah berakhir, dan saat ini sedang dilaksanakan proses Pemilihan Pengurus Lembaga Periode 2016-2020. Pengurus LPJK adalah perwakilan dari 4 (empat) unsur yakni unsur asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pakar, dan pemerintah. Setiap unsur ketika mencalonkan diri dalam kepengurusan harus memprioritaskan kepentingan pengembangan jasa konstruksi,



mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok unsurnya dan bersedia menjalankan tugas dan memberikan sumbangsih penuh kepada LPJK. Loyalitas dan integritas dari setiap pengurus yang bertugas selama empat tahun ke depan sangat diperlukan agar sektor jasa konstruksi menjadi kokoh, handal dan berdaya saing dapat tercapai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 secara garis besar, terdapat 3 kegiatan utama dalam proses pemilihan pengurus lembaga periode 2016-2020, yaitu:

1. Tahap I, Penetapan Kelompok Unsur Lembaga;
2. Tahap II, Penetapan Pengurus Lembaga;
3. Tahap III, Penguatan Pengurus Lembaga.

Dalam pelaksanaan proses Pemilihan Pengurus Lembaga ini, dibentuk Tim Pemilihan Lembaga yang terdiri atas Tim Sekretariat Pemilihan Lembaga dan Kelompok Kerja (Pokja) Penilai Kelompok Unsur yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 176/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Pengarah, Kelompok Kerja Penilai Kelompok Unsur, dan Sekretariat pada Tim Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2016-2020. Sedangkan pembentukan Kelompok Kerja Penilai Pengurus ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 470/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penilai Pengurus Lembaga Tingkat Nasional dan Provinsi pada Tim Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2016-2020.

Tahap I penetapan kelompok unsur sudah dilaksanakan oleh Pokja Penilai



Kelompok Unsur, dan hasilnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 471/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Instansi Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional Periode 2016-2020 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 472/KPTS/M/2016 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Instansi Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Periode 2016-2020.

Tahap II adalah penetapan pengurus Lembaga, yang dimulai dengan pelaksanaan Rapat Kelompok Unsur (RKU) Perdana. Rapat Kelompok Unsur (RKU) Perdana adalah rapat antara anggota kelompok unsur asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi atau para pakar dan/atau perguruan tinggi atau pemerintah, yang diselenggarakan dalam rangka penetapan perwakilan dari masing-masing Kelompok Unsur yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi pengurus Lembaga. Peserta RKU Perdana Nasional adalah asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 471/KPTS/M/2016, sedangkan dalam RKU Perdana Provinsi adalah kelompok unsur yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 472/KPTS/M/2016. Output RKU Perdana adalah Berita Acara setiap kelompok unsur yang berisi nama-nama yang diajukan untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan dan disahkan oleh seluruh anggota RKU Perdana.

Dalam RKU Perdana, setiap anggota kelompok unsur hanya boleh menugaskan 1 (satu) orang wakilnya, yang dibuktikan dengan adanya surat penugasan dari asosiasi/institusi pengutus. Yang perlu diperhatikan wakil kelompok unsur yang mengikuti RKU Perdana adalah dalam menentukan calon yang diusulkan untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (tahap lanjutan RKU Perdana) harus syarat umum dan syarat khusus menjadi pengurus lembaga.

RKU Perdana Tingkat Nasional telah dilakukan di Hotel Century Park, Jakarta pada hari Kamis, 21 Juli 2016. Dalam RKU

Perdana Nasional ini, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc. memberikan arahan secara langsung tentang harapan ditetapkan dan dikukuhkannya Pengurus Lembaga Periode 2016-2020 yang berintegritas tinggi kepada seluruh wakil kelompok unsur Lembaga Nasional.

Setiap Kelompok Unsur Tingkat Nasional melaksanakan RKU Perdana dengan dibantu oleh fasilitator. Fasilitator memfasilitasi dalam pembentukan formatur kelompok unsur, dibentuk 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris untuk memimpin RKU Perdana tersebut. Pelaksanaan RKU Perdana Tingkat Nasional berjalan lancar dan telah menghasilkan Berita Acara Kelompok Unsur RKU Perdana Tingkat Nasional yang berisi usulan calon pengurus Lembaga yang akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan. Hasil rekap berita acara berupa usulan calon pengurus Lembaga dapat dilihat di web resmi pemilihan pengurus lembaga yaitu <http://rekrutmenlpjk.pu.go.id>.

RKU Perdana Tingkat Provinsi dilakukan 2 (dua) gelombang yaitu gelombang 1 pada tanggal 28 Juli 2016 dan gelombang 2 pada tanggal 2 Agustus 2016. RKU Perdana Tingkat Provinsi gelombang 1 dilaksanakan serentak di 19 Provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara. RKU Perdana Tingkat Provinsi gelombang 2 dilaksanakan serentak di 15 provinsi, yaitu: Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Barat. Dalam pelaksanaan RKU Perdana Tingkat Provinsi ini melibatkan seluruh pejabat eselon III dan IV di Lingkungan

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Balai Wilayah Pembinaan Jasa Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Badan Pelaksana LPJK Provinsi.

Seluruh pelaksanaan RKU Perdana tingkat Provinsi berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan Berita Acara RKU Perdana setiap kelompok unsur dan didapatkan usulan nama calon pengurus yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan. Hasil rekap berita acara RKU Perdana di setiap provinsi sudah diumumkan dalam web resmi pemilihan pengurus lembaga yaitu <http://rekrutmenlpjk.pu.go.id>.

Tahapan yang akan dilakukan selanjutnya adalah tahapan uji kelayakan dan kepatutan, yang diharapkan akan dapat menghasilkan pengurus Lembaga yang memiliki integritas, loyalitas, dan profesional guna memajukan dunia jasa konstruksi. Uji kelayakan dan kepatutan calon pengurus Lembaga ini terdiri atas 2 pengujian, yaitu: uji psikologi dan uji substansi. Uji psikologi dilakukan oleh lembaga psikologi independen, sedangkan uji substansi dilakukan oleh Pokja Penilai Pengurus Lembaga.

Tantangan jasa konstruksi ke depan yang akan dihadapi oleh Pengurus Lembaga Periode 2016-2020 akan lebih berat, bukan hanya era globalisasi yang ditandai dengan pasar yang semakin terbuka, tetapi juga berbagai pengaturan kebijakan nasional yang juga mengalami perubahan, salah satunya adalah rencana perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi. Diharapkan nama-nama yang diusulkan dalam RKU Perdana baik Nasional maupun Provinsi ini merupakan calon terbaik dari perwakilan anggota kelompok unsur periode 2016-2020 yang amanah, kompeten, dan berintegritas tinggi sebagai kandidat pengurus LPJK yang dapat turut andil dalam memberikan sumbangsih nyata dalam pengembangan jasa konstruksi ke depan agar mampu berkarya di nasional dan bersaing di kancah internasional. ■





# Peninjauan Pembangunan MRT DAN PAKET PROYEK JALAN LAYANG

**D**irektorat Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi melalui timnya pada Subdit Konstruksi Berkelanjutan yaitu bersama Kasubdit dan Kasie Pemantauan dan Evaluasi melakukan peninjauan pada pelaksanaan konstruksi pembangunan MRT Jakarta wilayah CP 106 yang mulai dari Bunderan HI, selain itu juga adanya Peninjauan pada Paket Proyek Jalan Layang Ciledug – Tendean.

Kepala Sub Direktorat Konstruksi Berkelanjutan Ati Nurzamiati Hazar mengatakan bahwa tinjauan langsung lapangan ini diselenggarakan untuk mengoptimalkan implementasi gerakan budaya SMK3 di sektor konstruksi Indonesia. Hal ini terkait dengan tugas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR sebagai Pembina konstruksi harus memastikan K3 dijalankan secara maksimal pada proyek konstruksi bidang pekerjaan umum.

Memang belakangan ini Dirjen Bina Konstruksi sangat sering mengingatkan bahwa pentingnya SMK3 bagi para penyelenggara konstruksi bukan hanya untuk kelangsungan kerja dengan hasil yang baik tetapi juga untuk kesehatan para pekerja konstruksi itu sendiri. Sesuai pasal 4 ayat 2 pada Permen PU No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU. Kegiatan pemantauan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan pendampingan dan kegiatan pemantauan (monev) penerapan SMK3 Konstruksi.

Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Konstruksi Berkelanjutan



**Tinjauan langsung lapangan ini diselenggarakan untuk mengoptimalkan implementasi gerakan budaya SMK3 di sektor konstruksi Indonesia.**

Yanuar Munlait, menekankan maksud dari tujuan Site Visit Proyek Pembangunan Jalan Layang ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai sistem K3 dari segi inovasi teknologi yang digunakan dalam proyek, sebagai bahan masukan juga pedoman K3 dalam pembinaan penyelenggaraan Konstruksi yang nantinya bisa diterapkan terhadap pembangunan lainnya.

Ada beberapa manfaat dari kehadiran MRT yang ditargetkan bisa dioperasikan pada 2018 ini. Salah satu manfaatnya adalah berkurangnya kepadatan kendaraan di jalan karena dengan adanya MRT diharapkan dapat mengalihkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Dalam pembangunan proyek konstruksi hingga saat ini, tidak ada korban satupun kecelakaan kerja yang merenggut nyawa, yang artinya target dari zero accident terlaksana diterapkan kepada seluruh pekerja Konstruksi. ■



## Peninjauan Pembangunan MRT dan Paket Proyek Jalan Layang Ciledug-Tendean

✍️ Nizar & Tiwi

**D**irektorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR melakukan peninjauan ke proyek konstruksi pembangunan MRT Jakarta wilayah CP 106, dan ke Paket Proyek Jalan Layang Ciledug – Tendean. Peninjauan ini dilaksanakan oleh Subdit Konstruksi Bekelanjutan.

Kepala Sub Direktorat Konstruksi Berkelanjutan Ati Nurzamiati Hazar mengatakan bahwa tinjauan langsung lapangan ini diselenggarakan untuk mengoptimalkan implementasi gerakan budaya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di sektor konstruksi Indonesia. Hal ini terkait dengan tugas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Kementerian PUPR sebagai Pembina konstruksi harus memastikan K3 dijalankan secara maksimal pada proyek konstruksi bidang pekerjaan umum.

Aspek SMK3 sangat menjadi perhatian Kementerian PUPR, sebagaimana disampaikan Sekjen Kementerian PUPR pada Seminar Peningkatan Budaya K3 Dalam Pembangunan Infrastruktur Untuk Negeri pada Februari 2016 lalu, bahwa K3 harus menjadi budaya di setiap proyek pekerjaan konstruksi. Sebab Keselamatan bukan hanya untuk kelangsungan kerja dengan hasil yang baik tetapi juga untuk kesehatan para pekerja konstruksi itu sendiri. Sesuai pasal 4 ayat 2 pada Permen PU No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen



teknologi yang digunakan dalam proyek, sebagai bahan masukan juga pedoman K3 dalam pembinaan penyelenggaraan Konstruksi yang nantinya bisa diterapkan

kecelakaan kerja yang merenggut nyawa, yang artinya target dari zero accident terlaksana diterapkan kepada seluruh pekerja Konstruksi. ■



Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU. Kegiatan pemantauan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan pendampingan dan kegiatan pemantauan (monev) penerapan SMK3 Konstruksi.

Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Konstruksi Berkelanjutan Yanuar Munlait, menekankan maksud dari tujuan Site Visit Proyek Pembangunan Jalan Layang ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai sistem K3 dari segi inovasi

terhadap pembangunan lainnya.

Ada beberapa manfaat dari kehadiran MRT yang ditargetkan bisa dioperasikan pada 2018 ini. Salah satu manfaatnya adalah berkurangnya kepadatan kendaraan di jalan karena dengan adanya MRT diharapkan dapat mengalihkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Dalam pembangunan proyek konstruksi hingga saat ini, tidak ada korban satupun

# MTU Harapan untuk Bantu Entaskan Kemiskinan di Bali

✍️ Dendi Rahardian & Mirza Ayu Anindyta

Pengentasan kemiskinan serta peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi menjadi salah satu fokus utama pemerintah Provinsi Bali. Meskipun angka kunjungan turis berkunjung ke Bali semakin tinggi, tingkat kemiskinan di Bali meningkat pada semester I di tahun 2016. Dalam upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan untuk meningkatkan kompetensi pekerja konstruksi di Bali, Ditjen Bina Konstruksi melakukan penyerahan Mobile Training Unit (MTU). MTU secara resmi diserahkan oleh Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib kepada Gubernur Provinsi Bali, I Made Mangku Pastika, hari Jumat (5/8) di Denpasar.

“Kita didik para tenaga kerja di provinsi Bali yang belum berpengalaman untuk kemudian memiliki skill yang standar lalu disertifikat, kita pergunakan MTU, segera kita datangi desa atau kecamatan tertentu, kita latih SDM disana, selain masyarakat kita diberdayakan untuk menjadi pelaksana pembangunan di Bali, jangan hanya menjadi penonton”, ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPR, Yusid Toyib pada acara penyerahan MTU.

Kegiatan diawali dengan paparan Direktur Jenderal Bina Konstruksi yang memperkenalkan apa itu MTU. Yusid Toyib menerangkan bahwa MTU merupakan upaya menjemput bola yang dilakukan Ditjen Bina Konstruksi. Ia juga menjelaskan mengenai kegunaan MTU bagi peningkatan kompetensi pekerja konstruksi. Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat menjadi isu penting bagi proses pembangunan di Indonesia. Berdasarkan rencana strategis DJBK periode 2015-2019, diharapkan terdapat 750.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat baru, dimana 500.000 orang diantaranya adalah tenaga terampil atau tukang.

Hingga saat ini sudah tersebar 33 unit MTU ke berbagai Provinsi di Indonesia. MTU memiliki tiga komponen pendukung penting, diantaranya unit operasional kendaraan dan perlengkapan pelatihannya sebagai hardware, materi dan bahan ajar sebagai software, serta tenaga instruktur sebagai brainware. Satu paket yang akan menjadi penggerak terselenggaranya pelatihan.

Dalam pertemuan tersebut, Yusid Toyib juga menegaskan keseriusannya memantau penggunaan MTU di daerah-daerah. Ia

berharap mobil keliling ini bisa digunakan sebaik-baiknya. Hal serupa juga dinyatakan oleh I Made Mangku Prastika. “MTU ini harus dapat digunakan secara optimal, jangan sampai tidak maksimal dalam penggunaannya melatih tenaga konstruksi di Bali.”, ujar I Made Mangku Prastika.

Gubernur Provinsi Bali, I Made Mangku Prastika menyambut baik penyerahan MTU Ditjen Bina Konstruksi ini. Ia menyetujui pentingnya peningkatan kompetensi pekerja konstruksi bagi pembangunan daerahnya. Perhatian pemerintah provinsi Bali terhadap sektor konstruksi juga ditunjukkan dengan keberadaan SMK Konstruksi di Bali yang sudah menghasilkan alumni-alumni berprestasi. Keberadaan MTU ini diharapkan dapat membantu pekerja konstruksi yang berada di pelosok daerah Bali untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan pekerjaan.

DJBK pun terus menjalin 200 kerjasama strategis dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, LPJK, asosiasi, BUJK, proyek, dan masyarakat jasa konstruksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi di



Indonesia. Selain itu, DJBK mengupayakan salah satunya 40 persen pekerjaan konstruksi yang menerapkan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi.

Selain menyalurkan MTU ke berbagai daerah, DJBK pun terus meningkatkan jumlah sertifikasi pekerja konstruksi, salah satunya adalah kerjasama yang telah berjalan dengan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menjalankan skema sertifikasi tenaga kerja konstruksi, serta mengajak BUMN Konstruksi dalam penyaluran tenaga kerja. ■



Para tenaga kerja di provinsi Bali yang belum berpengalaman didik untuk memiliki skill yang standar lalu disertifikat. Dengan MTU, mereka didatangi baik di desa atau kecamatan dengan tujuan memberdayakan masyarakat setempat untuk menjadi pelaksana pembangunan di Bali, bukan hanya menjadi penonton

# Ditjen Bina Konstruksi Uji Kompetensi Tukang Batu dan Tukang Kayu dengan Menggunakan MTU di Gunung Kidul, Yogyakarta

**M**atahari Yogyakarta bersinar terik mengiringi kami (tim redaksi) menelusuri Kota Pelajar, aktifitas warga Yogyakarta juga mulai sibuk dengan aktifitas sehari-hari seperti bertani, berternak, sekolah, dan lain-lainnya. Pagi itu, tim tiba di Kantor Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2BG) di Jalan Kenari No. 14 A Yogyakarta, di sapa ramah oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pelaksana pemberdaya Jasa Konstruksi Prov. Yogyakarta, Rosdiana Puji lestari.

Tanpa berlama-lama kami langsung di ajak masuk ke dalam mobil dan bergegas menuju lokasi Uji sertifikasi tukang batu dan tukang kayu menggunakan MTU di Desa Ngilpar, Gunung Kidul, Yogyakarta. Menempuh jarak yang cukup jauh dari kantor PIP2BG menuju Gunung Kidul, membuat kami berbincang dengan Rosdiana tentang aktifitas Uji kompetensi tenaga kerja Konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Uji kompetensi tukang batu dan tukang kayu merupakan uji kompetensi angkatan 10 dan sebelumnya sudah pernah diadakan di beberapa daerah Yogyakarta seperti di Klaten, Pemalang, Bantul, dan sekarang Gunung kidul. Menurut Rosdiana, sejauh ini masyarakat Kota Yogyakarta cukup antusias dalam mengikuti kegiatan sertifikasi dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) yang diadakan langsung di Balai Desa masing-masing daerah. Karena dengan MTU, para peserta tidak perlu repot untuk pergi meninggalkan lokasi proyek pekerjaan atau dapat menjangkau rumah bagi peserta yang sedang tidak melakukan pekerjaan konstruksi.

Menurutnya dalam waktu dekat, Yogyakarta akan melakukan pembangunan Bandara baru yang membutuhkan jasa tenaga kerja konstruksi, dengan kegiatan uji kompetensi seperti ini para peserta yang telah mendapatkan sertifikat diharapkan dapat mendominasi pekerjaan infrastruktur tersebut hingga proyek-proyek lainnya yang ada di seluruh Indonesia, sehingga Indonesia siap menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang di mulai sejak awal 2016.

Tiba di balai desa Ngilpar Kabupaten

Gunung Kidul, tim bersama rombongan di sambut oleh para peserta dan beberapa pegawai balai desa Ngilpar. Sesampainya di Balai desa, Panitia menyiapkan perlengkapan Uji Kompetensi sekaligus membuka acara Uji kompetensi tukang kayu dan tukang batu oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pelaksana pemberdaya Jasa Konstruksi Prov. Yogyakarta,

Rosdiana Puji lestari dan di dampingi oleh Kepala Desa Ngilpar, Perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosari dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov. Yogyakarta.

Kegiatan yang diadakan selama 3 hari, 23 – 25 Agustus 2016, sebanyak 60 orang warga desa Kedung Poh, Kecamatan ngilpar, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mengawali kegiatan dengan mengikuti kelas dan memperoleh materi pembelajaran yang disampaikan mengenai BPJS Ketenagakerjaan, para peserta dijelaskan bahwa pentingnya perlindungan terhadap pekerja terutama pekerja konstruksi/bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan bagi yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan akan mendapatkan santunan dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan jenis





## Uji kompetensi tukang batu dan tukang kayu merupakan uji kompetensi angkatan 10 dan sebelumnya sudah pernah diadakan di beberapa daerah Yogyakarta

bata untuk taman dan plesteran dinding, sementara peserta tukang kayu membuat kusen pintu dan boven light. Tidak lupa, asesor juga mengadakan ujian lisan atau wawancara yang dilakukan secara bergantian dengan memanggil peserta satu per satu di sela-sela uji praktik.

Di hari terakhir, kegiatan diawali dengan melanjutkan uji praktik untuk pekerjaan yang belum selesai dan uji wawancara untuk peserta yang belum melakukan pada hari kedua. Berdasarkan hasil uji sertifikasi yang dilakukan oleh asesor dari LPJK Yogyakarta, peserta dari kompetensi tukang batu dinyatakan kompeten seluruhnya, dengan perincian 21 orang tingkat I dan 9 orang tingkat II.

Serupa dengan peserta tukang batu, peserta tukang kayu juga dinyatakan kompeten seluruhnya, dengan perincian 8 orang tingkat I, 2 orang tingkat II, dan 20 orang tingkat III. Keseluruhan peserta yang dinyatakan kompeten akan diberikan Sertifikat Keterampilan dari USTK LPJKD yang berlaku selama tiga (3) tahun.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus berupaya meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat di antaranya dengan menggunakan MTU, yang mampu menjangkau pekerja konstruksi hingga ke pelosok desa, seperti di desa Nglipar Yogyakarta. Sejauh ini Kementerian PUPR sudah menyebarkan 33 MTU di 33 Provinsi di Indonesia dan yang sudah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah provinsi sebanyak 14 unit.

Dengan menggunakan MTU yang dapat menjangkau tenaga kerja konstruksi hingga desa seperti ini, diharapkan target 750.000 tenaga kerja bersertifikat dapat terpenuhi dengan cepat. Sehingga Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang sudah berlangsung sejak awal 2016 ini dapat dihadapi oleh tenaga kerja konstruksi Indonesia, dan tenaga kerja konstruksi Indonesia merajai proyek pembangunan Infrastruktur di Indonesia. ■

kecelakaan kerja serta akibat yang di derita.

Setelah diawali dengan pemberian materi tentang BPJS ketenagakerjaan, peserta mengikuti pemaparan materi oleh Instruktur sesuai kompetensi yang dikuasai oleh para peserta, yaitu tukang batu yang disampaikan oleh Ivan Prasetyo W., S.T., dan tukang kayu oleh Darsono Yotam. Pemaparan materi ini diawali dengan pentingnya masalah keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang meliputi pengertian dan penerapannya, dilanjutkan materi tukang batu dan materi tukang kayu. Materi tukang batu yang disampaikan meliputi membaca gambar, penyiapan lokasi pekerjaan, pembuatan adukan semen, pembuatan pasangan pondasi, pemasangan kusen pintu jendela. Sedangkan materi tukang kayu meliputi perencanaan dan penyusunan pekerjaan, gambar kerja dan spesifikasi, pengukuran dan perhitungan kebutuhan bahan, penyiapan proses konstruksi kayu, pembuatan komponen bangunan, merakit kusen kayu, perakitan daun pintu/jendela kayu, dan perakitan kuda-kuda kayu.

Hari kedua, peserta menjalani uji tulis, uji praktik, dan uji wawancara oleh asesor dari LPJK Yogyakarta. Dalam uji praktik, peserta tukang batu mendapat tugas membuat pasangan

# Continuing Professional Development, Jaminan Profesionalisme Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia

 Kristinawati Pratiwi Hadi

Sejalan di telah dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai 1 Januari 2016, dan untuk mendorong kemajuan tenaga kerja konstruksi di Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR mengembangkan *Continuing Professional Development* (CPD).

CPD atau Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) didasari oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 45 tahun 2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi. Kaitannya dengan MEA antara lain termasuk dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) on *Engineering Services* khusus untuk pemegang ASEAN *Chartered Professional Engineer* (ACPE) dan ASEAN *Architectural* (AA), atau Asosiasi Engineer ASEAN dan Asosiasi Arsitek ASEAN yang anggotanya para profesional *engineer* dan arsitek dari 10 negara ASEAN.

Dengan adanya CPD menunjukkan bahwa seorang insinyur profesional bukanlah gelar yang diperoleh hanya berdasarkan sertifikat saja, tetapi merupakan

suatu proses panjang dari pengalaman dan pendidikan tambahan yang diperoleh sepanjang karirnya.

Wujud CPD adalah sebuah *Log Book*, yang berguna dalam mendokumentasikan kinerja yang telah dicapai selama jenjang karir, yang akan menjadi bukti autentik (*evidence*) yang tidak terbantahkan. Dengan CPD Pemerintah pun akan mendapatkan gambaran aset SDM nasional dan gambaran kekuatan insinyur Indonesia untuk menyokong pembangunan infrastruktur nasional.

Sehingga dengan demikian, CPD adalah komitmen untuk profesionalisme yang menunjukkan sebuah tanggung jawab personal untuk menjamin bahwa seseorang m e m i l i k i

keterampilan dan pengetahuan guna menghadapi tantangan perubahan dunia. Proses ini tentunya harus bermanfaat bagi individu, lingkungan profesi, dunia konstruksi, maupun masyarakat secara umum. Bahkan CPD juga bisa menjadi solusi berbagai persoalan di dunia konstruksi seperti rendahnya mutu bangunan,

kegagalan konstruksi, kecelekaan kerja, produktivitas yang rendah dan lain sebagainya.

Tiga kata kunci dalam penerapan CPD adalah mempertahankan, meningkatkan, dan memperluas kompetensi seorang insinyur. Selain itu, CPD akan melindungi masyarakat dari praktek-praktek para praktisi yang tidak berkualitas dan tidak etis dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Inti dan kekuatan utama CPD ada pada *innovation and change, lifelong learning, selfevaluation dan portfolio*. Para tenaga ahli harus berinovasi dengan merubah pola pikir, mempelajari hal-hal baru dan membuat sesuatu yang diperlukan pembelajaran sepanjang hayat serta evaluasi mandiri terhadap capaian pembelajaran yang telah dilakukan.

Tidak kalah penting, setelah pembelajaran dan evaluasi, pada akhirnya segala yang kita lakukan harus terdokumentasi dengan baik dalam portfolio. Hal inilah yang disebut dengan *knowledge management*. Sebagaimana disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib pada *Workshop Continuing Professional Development* (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) Ahli Jalan dan Jembatan serta Tenaga Ahli K3 Konstruksi, Senin (5/9) : “Hasil seminar, kajian, *workshop* dan diskusi harus terdokumentasikan, dan bagaimana tindaklanjut dari hasil tersebut harus diketahui oleh masyarakat yang membutuhkan, serta mudah diakses”.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam hal ini memiliki Balai Penerapan Teknologi Konstruksi untuk menjadi pelopor pengembangan *knowledge management*. Balai ini menjadi pusat riset dan pusat pengetahuan mengenai



**CPD adalah komitmen untuk profesionalisme yang menunjukkan sebuah tanggung jawab personal untuk menjamin bahwa seseorang memiliki keterampilan dan pengetahuan guna menghadapi tantangan perubahan dunia**

industri konstruksi nasional. Harapannya hal ini dapat memberikan sumbangsih kepada stakeholders jasa konstruksi terutama LPJK, Asosiasi Profesi dan Asosiasi Badan Usaha.\*



## Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Manajemen Konstruksi

✍ Agus Rachmat Mulyana

**D**alam pembangunan proyek konstruksi sering sekali ditemukan berbagai masalah. Pada umumnya, masalah sering ditemukan pada tahap pelaksanaan proyek, seperti perubahan desain, lemahnya pengawasan dan pengendalian, koordinasi yang kurang baik antara pihak yang terlibat, dan keterlambatan kedatangan alat dan material. Perubahan desain pada umumnya terjadi akibat tidak dilakukannya proses perencanaan mutu dalam memahami keinginan pelanggan dan penjaminan

mutu pada saat pemeriksaan gambar kerja. Lemahnya pengetahuan kontraktor dan konsultan manajemen konstruksi dapat menimbulkan lemahnya pengawasan dan pengendalian. Sedangkan keterlambatan alat dan material dapat terjadi akibat kurang telitnya kontraktor dalam memperkirakan waktu datangnya material dari lokasi keberadaan material.

Masalah – masalah yang timbul pada saat pelaksanaan proyek tersebut pada akhirnya akan berdampak pada perubahan waktu, mutu dan biaya proyek. Sehingga

dalam mendukung target program pembangunan infrastruktur pemerintah periode tahun 2015 - 2019 perlu dilakukan penerapan dalam sistem manajemen mutu terhadap penjamin mutu penyelenggaraan proyek konstruksi, salah satunya adalah penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap para ahli manajemen konstruksi. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Manajemen konstruksi ini dapat meningkatkan kemampuan para ahli manajemen konstruksi, sehingga dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan proyek konstruksi, yang pada akhirnya target biaya, waktu dan mutu dapat tercapai.

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan dalam hal ini memiliki peranan utama mengenai Pembinaan konstruksi. Sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas



pembinaan konstruksi yang dapat mempercepat tercapainya tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, dibutuhkan penerapan mengenai Sistem Manajemen Mutu oleh berbagai stakeholder pembinaan jasa konstruksi dan pemahaman mengenai manajemen konstruksi bagi para pelaku pekerjaan konstruksi. Agar pelaksanaan program pemberdayaan tersebut berlangsung dengan efektif dan efisien, diperlukan suatu Bimbingan Teknis yang handal dan komprehensif dalam penyelenggaraan pemberdayaan sehingga dihasilkan output pemberdayaan yang sesuai mutu, tepat guna dan berhasil guna.

Sebagai langkah penerapan Bimbingan Teknis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

**Tabel 1. Peserta Bimbingan Teknis Ahli Muda dan Madya Manajemen Konstruksi**

No	Asosiasi Profesi/ BUMN Karya	Jumlah Utusan Peserta Ahli Muda Manajemen Konstruksi (Orang)	Jumlah Utusan Peserta Ahli Madya Manajemen Konstruksi (Orang)
1	HAMKI	23	19
2	INTAKINDO	5	8
3	GAPENSI	-	2
4	PT. Wijaya Karya	-	6

Nomor 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mensosialisasikan Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pembinaan Konstruksi.

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan melalui Sub Direktorat Pemberdayaan Wilayah III melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Muda dan Madya Manajemen Konstruksi. Kegiatan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan pada tanggal 1 - 3 Juni 2016 untuk Ahli Muda Manajemen Konstruksi dan tanggal 14 & 21 Juni 2016 untuk Ahli Madya Manajemen Konstruksi (dua hari terpisah untuk Ahli Madya Manajemen Konstruksi) berlokasi di Hotel Ambhara Jl. Iskardarsyah Raya No 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Muda dan Madya Manajemen Konstruksi ini bekerja sama dengan asosiasi profesi Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi (HAMKI), Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO), Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) dan BUMN Karya. Kerjasama yang dilakukan antara Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan dengan HAMKI, INTAKINDO, GAPENSI dan BUMN Karya yaitu dari segi peserta, narasumber, akomodasi, tempat pelatihan dan biaya sertifikasi. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan menyediakan narasumber dan tempat pelatihan sedangkan untuk asosiasi profesi dan BUMN Karya menyediakan peserta (rincian peserta tertera pada tabel 1), akomodasi dan biaya sertifikasi (biaya akomodasi dan sertifikasi ditanggung oleh peserta sebagai anggota asosiasi).

Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Ahli Muda dan Madya Manajemen Konstruksi ini merupakan Narasumber yang memang sudah diakui dalam bidang manajemen konstruksi baik pengalamannya menjadi narasumber maupun tenaga ahli manajemen konstruksi dalam proyek konstruksi. Narasumber dalam kegiatan ini juga telah memiliki sertifikat TOT dalam bidang Manajemen Konstruksi. Materi yang digunakan oleh narasumber berdasarkan modul dari SKKNI tahun 2007 dari Pusbin KPK untuk Ahli Muda Manajemen Konstruksi sedangkan untuk ahli Madya materi yang digunakan berasal dari narasumber yang bersangkutan.

Tabel 2. Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Muda dan Madya Manajemen Konstruksi.

Sebagai evaluasi, dari awal sampai akhir kegiatan terhadap pengetahuan peserta dan penyerapan materi yang disampaikan oleh narasumber, maka dilakukan evaluasi melalui pre test dan post test. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pretest nilai peserta secara umum dibawah rata-rata sedangkan setelah post test rata-rata nilai peserta naik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan peserta terhadap manajemen konstruksi yang merupakan seorang ahli manajemen konstruksi dirasa sangat kurang. Oleh karena itu peningkatan kemampuan untuk para pekerja ahli Manajemen konstruksi Indonesia sangat diperlukan, harapannya para tenaga ahli manajemen konstruksi kedepannya dapat memecahkan atau meminimalkan setiap masalah yang timbul pada proyek konstruksi sehingga semua proyek konstruksi yang menjadi target pemerintah maupun swasta dapat memenuhi waktu, mutu dan biaya yang sudah ditetapkan.

**Tabel 2. Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis & Sertifikasi Ahli Muda dan Madya Manajemen Konstruksi.**

No	Nama	Narasumber Kegiatan Bimtek dan Sertifikasi	Jabatan dalam Instansi
1	Ir. Pito Sumarno, MT, M.PU	Ahli Muda	Direktur Eksekutif IAMPI
2	Drs. Ir. Afrizal Nursin, MT	Ahli Muda dan Ahli Madya	Lektor Kepala PNJ
3	Ir. Asdarianto	Ahli Madya	Project Advisor Angkasapura

# Sosialisasi dan Pendaftaran ASEAN MRA on Engineering Services and ASEAN MRA on Architectural Services.

✍ Rosdiana Puji Lestari

**M**enghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di awal tahun 2016, Indonesia terus berupaya menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang berkompeten dan handal agar mampu bersaing dengan para tenaga kerja konstruksi asing yang masuk ke Indonesia. Peluang kerja para tenaga kerja asing konstruksi tersebut juga sangat tinggi, pasalnya Indonesia saat ini tengah melakukan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dari sabang hingga marauke.

Saat ini, tenaga kerja konstruksi Indonesia baik ahli maupun terampil terus berupaya

mendapatkan eksistensinya di negeri sendiri dengan mengikuti berbagai program sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat yang menjamin kemampuan dan keterampilan tenaga kerja konstruksi Indonesia sama dengan tenaga kerja konstruksi asing. Tidak hanya mengerjakan pekerjaan konstruksi di dalam negeri, diharapkan dengan memiliki sertifikat mereka dapat mengembangkan kemampuan dengan menimba pengalaman di berbagai proyek konstruksi di luar negeri.

Untuk itu, dalam kerangka kerjasama jasa layanan Engineering dan Arsitektur di tingkat Asia Tenggara memiliki kesepakatan masyarakat ASEAN yang disebut dengan



Mutual Recognition Arrangement (MRA).

MRA bertujuan untuk memfasilitasi pergerakan atau mobilisasi jasa/layanan profesional di wilayah ASEAN serta melakukan pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan penggunaan standar dan kualifikasi dalam praktek Engineering dan Arsitektural sesama negara anggota ASEAN.

Mempersiapkan tenaga kerja Engineering dan Arsitek Indonesia dalam MRA tersebut, maka Tim Pembina Jasa Konstruksi melalui Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi, Balai Pengujian Informasi Permukiman dan Bangunan dan Pengembangan Jasa Konstruksi (BPIPBPJK), Dinas PUP-ESDM D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Workshop MRA yang bertujuan untuk menambah anggota ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) dan ASEAN Architect (AA) dari Indonesia. Guna persiapan dan pembinaan tenaga profesional dan teregister di tingkat ASEAN, sehingga tenaga tersebut dapat diakui dan disetarakan dengan tenaga kerja dalam lingkup regional ASEAN.

ACPE – Indonesia, yaitu : Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektrikal, Teknik Kimia, Teknik Fisika, Teknik Aeronautika, Teknik Kelautan, Teknik Industri, Teknik Lingkungan, Teknik Perminyakan dan Teknik Pertambangan, sedangkan untuk Teknik Geodesi akan mempunyai MRA tersendiri (Surveying Qualification) dan menjelaskan bagaimana proses menjadi ACPE dan RFPE (Engineering).

Sesi kedua, penyampaian materi mengenai ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services dan proses menjadi AA dan RFA (Arsitek). Sesi terakhir, peserta dijelaskan mengenai bagaimana cara mengisi form aplikasi untuk menjadi keanggotaan dari ACPE dan RFPE serta AA dan RFA. Panitia membagikan form



Kegiatan Sosialisasi dan Pendaftaran ASEAN MRA On Engineering Services and ASEAN MRA On Architectural Services diselenggarakan pada hari Jumat, 19 Agustus 2016. Penyelenggaraan kegiatan ini dibiayai oleh APBD Pemda DIY melalui DPA SKPD Balai Pengujian Informasi Permukiman dan Bangunan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, Dinas PUP-ESDM DIY Nomor 05/ DPA/2016 tanggal 31 Desember 2015.

Kegiatan ini dibuka oleh Ir. Bambang Sugiharto, M.T. selaku Kepala Balai Pengujian, Informasi, Permukiman dan Bangunan dan Pengembangan Jasa Konstruksi (BPIPBPJK) D.I. Yogyakarta didampingi oleh Ir. Anita Tambing, M. Eng. dari Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dan Rosdiana Puji Lestari, S.T., M. Eng. selaku Kepala Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi, Balai PIPBPJK.

Sesi pertama diawali dengan penyampaian materi mengenai ASEAN mutual Recognition Of Arrangement on Engineering Services yang disampaikan oleh Ir. Anita Tambing, M. Eng. hal yang disampaikan diantaranya mengenai disiplin

aplikasi berupa soft file dan hardcopy kepada peserta yang bersedia untuk mendaftar. Dari kegiatan sosialisasi tersebut banyak peserta yang berminat untuk mendaftar menjadi keanggotaan dari ACPE dan RFPE serta AA dan RFA. Diharapkan di kemudian hari banyak yang berminat untuk menjadi tenaga kerja Engineering dan Arsitek Indonesia dalam MRA.\*



**MRA ini merupakan kesepakatan masyarakat ASEAN dalam kerangka kerjasama jasa layanan Engineering dan Arsitektur di tingkat Asia Tenggara**



## Kerja Sama Bidang Konstruksi Antara Kementerian PUPR, Kemenristekdikti dan BNSP dalam Rangka Penguatan Manajemen Mutu LSP Politeknik di Seluruh Indonesia

**D**irektorat Jenderal Bina Konstruksi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berinisiasi dalam pengembangan sertifikasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) konstruksi, terutama dalam dunia pendidikan. Dan dengan telah disahkannya skema sertifikasi konstruksi untuk politeknik dan tindak lanjut rangkaian penyelenggaraan program peningkatan kompetensi peserta didik politeknik bidang konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi melalui Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan

mendukung dalam rangka pembentukan dan pengembangan manajemen mutu LSP Politeknik.

Untuk mewujudkan hal diatas, Dit. Kerja Sama dan Pemberdayaan berupaya mendukung percepatan sertifikasi di Politeknik dengan tercapainya aspek legal pemberlakuan skema sertifikasi untuk politeknik yang telah disahkan pada Bulan Januari 2016, agar setiap politeknik wajib memiliki LSP Politeknik mandiri dengan manajemen mutu LSP yang berkualitas. Dimana syarat manajemen mutu LSP

yang berkualitas, LSP politeknik harus memiliki assesor kompetensi dari para dosen politeknik tersebut, para assesor harus dapat menyusun skema sertifikasi, para assesor dapat mengembangkan & mendokumentasikan manajemen mutu LSP dan tempat uji kompetensi, dan auditor smm.

### **Bimbingan Teknis Asesor Kompetensi untuk Politeknik**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan mutu manajemen LSP di setiap politeknik, sebagai tindak nyata dalam



rangka mendukung target penciptaan SDM konstruksi kompeten dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, dimana Politeknik memiliki manajemen LSP yang lebih baik, dengan memiliki Asesor Kompetensi yang bersertifikat, sehingga politeknik dapat menghasilkan tenaga konstruksi yang berkompoten melalui pendidikan dan uji kompetensi pada Politeknik yang tersebar di Indonesia. Dengan demikian akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Kegiatan bimbingan teknis tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 11 - 15 April 2016, diikuti sebanyak 69 peserta dengan rincian 60 peserta berasal dari 16 Politeknik Negeri, 5 peserta dari 4 BUMN dan 4 peserta dari Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan. Narasumber Bimbingan Teknis Asesor Kompetensi sebanyak 18 orang, dengan rincian 17 narasumber dari BNSP dan 1 narasumber dari PNJ. Kegiatan Bimbingan Teknis ini terdiri dari 4 hari bimbingan teknis dan 1 hari uji kompetensi. Dari hasil uji tersebut, 61 peserta dinyatakan kompeten (K) dan 8 peserta dinyatakan belum kompeten (BK).

Sub Direktorat Kerja Sama, sebagai unit di bawah Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi. Oleh karena itu untuk menunjang pelaksanaan tugas pemberian bimbingan teknis atau pelatihan, diperlukan Pelaksanaan Pelatihan Asesor Kompetensi.

Pelaksanaan Pelatihan Asesor Kompetensi adalah sebagai kegiatan untuk melatih para calon asesor yang berasal dari para dosen Politeknik Negeri berakreditasi A di Indonesia.

#### **Bimtek Penyusunan Skema Sertifikasi**

Bimtek Penyusunan Skema Sertifikasi terdiri dari pelatihan penyusunan skema, materi uji kompetensi (MUK), dan perangkat asesmen. Beberapa SKKNI yang digunakan dalam Bimtek Penyusunan Skema Sertifikasi menyesuaikan dengan SKKNI terbaru dari Kemenaker. Dimana kegiatan ini bertujuan menyusun skema dan perangkat asesmen yang sesuai dengan kebutuhan di politeknik di seluruh Indonesia.

Bimtek Penyusunan Skema Sertifikasi Bimtek Pengembangan dan pendokumentasian sistem manajemen mutu LSP dan TUK pada tanggal 11 - 14 Mei 2016, hal ini ditujukan agar setiap LSP dapat berkembang, dengan meningkatkan mutu dari lembaga sertifikasi profesi itu sendiri dan tempat uji kompeten yang memadai, sehingga hasil uji nya pun merupakan hasil uji yang berkualitas dan menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi.

Rangkaian keempat merupakan rangkaian terakhir dari rangkaian kegiatan peningkatan mutu LSP adalah bimbingan teknis Auditor Sistem Manajemen Mutu, yang akan dilaksanakan pada 18-20 Mei 2016 dan merupakan bimbingan teknis penutup dari 4 rangkaian bimbingan teknis penguatan manajemen politeknik di seluruh Indonesia. Bertujuan agar ke depan politeknik dapat melakukan persiapan dalam pembuatan LSP dan selanjutnya LSP tersebut dapat diverifikasi.

Diharapkan dari dilaksanakannya rangkaian kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menjadi kerja sama yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta menjaga kualitas mutu pelaksanaan uji kompetensi, sehingga melalui program ini diharapkan tukang bangunan di Indonesia akan semakin terlatih secara teori dan praktik, berdaya saing tinggi, dan bersertifikat. ■





## Balai Jasa Konstruksi Makassar: Kantor Baru Semangat Baru untuk Pembinaan Konstruksi

✍️ Kristinawati Pratiwi Hadi & Dendy Rahadian

**D**JBK. Beberapa waktu lalu Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yusid Toyib meresmikan Kantor Baru Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar. Adanya Kantor baru yang berfungsi juga sebagai tempat Pelatihan ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Kementerian PUPR khususnya dan bangsa ini pada umumnya. Sebab dengan demikian tugas untuk mencetak tenaga-tenaga terampil konstruksi dan pembinaan sektor konstruksi terutama di wilayah Sulawesi akan semakin maksimal, mengingat kantor sebelumnya belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

Meskipun terbilang baru, tidak ada salahnya jika kita mengulas lebih dalam mengenai bagaimana kantor baru Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar ini. Dan sebelum membahas mengenai detail kantor baru, berikut ini profil mengenai Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar.

Setelah terbit Permen PUPR No.20/PRT/M/2016 pada tanggal 1 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, nomenklatur balai pelatihan konstruksi wilayah IV Makassar berubah menjadi balai jasa konstruksi wilayah VI Makassar. Dengan demikian berubah pula struktur organisasi

yang baru yaitu Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar yang dijabat oleh Moody Nicson Sanger, ST, M.Sc; Kasubbag Tata Usaha yang dijabat oleh Adi Saputro, S. Sos ; Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pengendalian Mutu yang dijabat oleh Setyarso, SE, MT ; Kepala Seksi Perencanaan dan Informasi (masih menunggu pelantikan) serta kelompok Jabatan Fungsional.

Saat ini jumlah pegawai Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Makassar berjumlah 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari 13 orang PNS, 12 orang Non PNS, 4 orang Pramubakti dan 9 Orang Satpam dan 2 orang Driver.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kantor lama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar bertempat di Jl. Nuri No. 19, Mariso, Makassar. Sedangkan alamat baru bertempat di Jl. Batara Bira VI, Baddoka, Makassar. Luas gedung Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar adalah 3400 M2 yang terdiri dari 3 gedung yaitu Gedung Utama, Gedung Workshop dan Gedung Mess.

Rinciannya yaitu , Gedung Utama sejumlah 14 Ruangan yang terdiri dari : 1 Ruang Kepala Balai; 1 Ruang Bendahara; 2 Ruang Eselon IV; 4 Ruang Fungsional; 2

Ruang Staff; 1 Ruang Perpustakaan/Arsip; 1 Ruang Sekretaris Kepala Balai; 1 Ruang Rapat; dan 1 Aula.

Yang berikutnya Gedung Workshop terdiri dari 14 Ruangan yaitu : 4 Ruang Workshop (Tukang Kayu, Batu, Besi, Plumbing); 4 Ruang Peralatan; 4 Ruang kelas ukuran kecil (Lantai 1); 1 Ruang kelas ukuran Sedang (Lantai 2); 1 Ruang kelas ukuran Besar (Lantai 2); dan 4 Ruang Instruktur (Lantai 2).

Sedangkan Gedung Mess terdiri dari 29 Ruangan yaitu : 25 Ruang Tidur Peserta (twin bed); serta 4 Ruang Tidur Instruktur (single bed).

Sampai saat ini belum ada pelatihan yang dilakukan di Workshop Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, karena masih ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan

maupun oleh para PPK Jasa Konstruksi Provinsi adalah sebanyak 2 Angkatan Pelatihan Asessor Bidang Konstruksi, 1 Angkatan Bimtek SMK3, 1 Angkatan Bimtek SMM, 1 Angkatan Bimtek PBJ, 5 Angkatan Pelatihan Keterampilan PPK Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Utara, 3 Angkatan Pelatihan Keterampilan dan 4 Angkatan Pelatihan dan Sertifikasi dengan MTU PPK Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo, 5 Angkatan Pelatihan Keterampilan dan 3 Angkatan Fasilitas Uji Bidang Konstruksi PPK Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tengah, serta 4 Angkatan Pelatihan Keterampilan, 2 Angkatan Pelatihan Keahlian, 3 Angkatan Fasilitas Uji PPK Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebagai tambahan informasi,

Sedangkan untuk target pelatihan untuk PPK Provinsi antara lain : PPK Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 5 angkatan pelatihan keterampilan, 4 angkatan pelatihan keahlian dan 6 angkatan pelatihan dan sertifikasi dengan MTU. Untuk PPK Jasa Konstruksi Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 angkatan pelatihan keterampilan, 4 angkatan pelatihan keahlian, 3 Angkatan Fasilitas Uji dan 8 angkatan pelatihan dan sertifikasi dengan MTU. Untuk PPK Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 5 angkatan pelatihan keterampilan, 4 angkatan pelatihan keahlian, 3 Angkatan Fasilitas Uji dan 8 angkatan pelatihan dan sertifikasi dengan MTU.

Untuk PPK Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 angkatan pelatihan keterampilan, 4 angkatan pelatihan keahlian, 3 Angkatan Fasilitas Uji. Serta untuk PPK Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 5 angkatan pelatihan keterampilan, 4 angkatan pelatihan keahlian, 3 Angkatan Fasilitas Uji dan 8 angkatan pelatihan dan sertifikasi dengan MTU.

Untuk mencapai target tersebut beberapa langkah dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, antara lain untuk kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Balai Jasa Konstruksi, Balai berkoordinasi dengan direktorat terkait informasi rencana penyelenggaraan kegiatan. Sedangkan untuk proses perekrutan peserta, balai bekerja sama dengan LPJK Provinsi setempat untuk melakukan perekrutan peserta. Begitu juga untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK Jasa Konstruksi di Provinsi, Balai berkoordinasi dengan PPK dan LPJK Provinsi setempat.

Dalam pelaksanaan pelatihan, kesulitan yang dihadapi adalah adanya ketergantungan dengan stakeholder lain dalam pelaksanaan pelatihan, contohnya untuk pencetakan assessor bidang konstruksi jadwalnya tertunda karena adanya ketidaksiapan dari pihak LPJKP, untuk pencetakan assessor SMK terkendala dari ketidaksiapan BNSP.

Untuk itu, perlu adanya MoU dengan para stakeholder khususnya yang terlibat langsung dengan kegiatan pembinaan seperti LPJK dan BNSP agar kedepannya mereka lebih siap mendukung pelaksanaan kegiatan Balai Pembinaan Konstruksi.

Selain itu perlu juga pengadaan alat berat seperti Hydraulic Excavator, Wheel Loader, Motor Grader untuk memaksimalkan Simulator yang sudah ada, dimana simulator dipakai sebagai pengenalan awal (untuk meminimalkan resiko) dan untuk alat beratnya biasa dipakai untuk pelatihan akhir sekaligus asesmennya. ■



hingga Workshop ini siap digunakan untuk pelatihan.

Terkait masih perlunya penyempurnaan workshop, maka masih terus dilakukan penataan dan pengadaan peralatan workshop. Rencananya akan diadakan jasa konsultasi dari pihak VEDC malang untuk menata peralatan yang sudah ada serta mendata peralatan yang masih kurang, sekaligus melatih instruktur untuk dalam menunjang kegiatan pelatihan di workshop BPKW VI.

Lingkup kerja (pelatihan) Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Dan hingga pertengahan tahun 2016, jumlah pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar sendiri

berdasarkan DIPA tahun anggaran 2016, di dalam anggaran balai jasa konstruksi wilayah VI Makassar terdapat anggaran para PPK Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Target pelatihan yang ingin dicapai pada tahun 2016 adalah sebanyak 87 angkatan yang terdiri dari 5 angkatan pelatihan assessor bidang konstruksi, 6 angkatan pelatihan training of course, 3 angkatan TOT Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha Kualifikasi Kecil, 2 Angkatan Bimtek SIPJAKI, 6 angkatan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, 4 angkatan Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 3 angkatan Bimtek Sistem Manajemen Mutu, 1 angkatan Management Of Training dan 1 Angkatan TOT dengan IALKI di Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar.

# Bimtek SMK3 Mendukung Terciptanya Konstruksi Indonesia yang Handal

✍️ Nizar Gilang & Tiwi

Pembangunan Infrastruktur di suatu Negara memegang peranan yang sangat penting. Bukan hanya menjadi produk fisik berupa sarana prasarana namun lebih dari itu Infrastruktur memberikan multiplier effect bagi sektor-sektor yang lain. Sehingga perannya lebih jauh lagi menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi, baik lokal, regional, maupun nasional. Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya pembangunan Infrastruktur akan menentukan pembangunan bangsa dan laju perekonomian Negara.

Keberhasilan pembangunan prasarana dan sarana selain diukur dengan dimensi dan waktu, juga ditentukan oleh kinerjanya yang mencakup kehandalan, berfungsinya bangunan sesuai rencana serta aspek kemanfaatan bagi masyarakat. Keberhasilan ini hanya akan tercapai, apabila para pelaku pembangunan benar-benar bekerja secara profesional dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Namun ada salah satu hal yang harus diingat bahwa Konstruksi memiliki sifat kompleks dan menimbulkan resiko tinggi bagi keselamatan dan kesehatan baik bagi para pekerja maupun masyarakat umum lainnya.

Berbagai bukti empirik menggambarkan bahwa kecelakaan konstruksi dapat mengakibatkan kerugian bagi penyelenggara, para pekerja, masyarakat, lingkungan dan juga sektor konstruksi itu sendiri serta citra negara.

Beberapa kasus kecelakaan kerja dan kegagalan konstruksi sering kita dengar di media seperti runtuhnya ruko Cendrawasih Permai Samarinda (Juni 2014), runtuhnya hanggar bandar udara Sultan Hasanudin Makassar (Maret 2015), runtuhnya Jembatan pulau Dompok Tanjung Pinang (Oktober 2015) serta robohnya jembatan by-pass Banyumulek, Lombok (Oktober 2015), dan kembali terjadi dengan runtuhnya pembangunan jembatan di Lombok Timur pada pertengahan 2016.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) masih sangat rendah. Berbagai upaya bersama dari pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan terkait lainnya, sangat diperlukan untuk dapat menekan kecelakaan kerja konstruksi.

Melihat tingginya dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja di proyek konstruksi, maka aspek keselamatan kerja sudah seharusnya menjadi perhatian utama semua pihak serta menjadi pelajaran (lessons learn) baik oleh pemerintah maupun para pelaku industri konstruksi.

Untuk itu sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pemenuhan standar SMK3 ini merupakan bagian dari tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan merupakan pemenuhan segala standar atau regulasi acuan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi dimulai dari tahapan pra-konstruksi sampai dengan tahapan penyelesaian proyek.

Atas dasar hal tersebut di atas, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Perlindungan tersebut berbentuk undang-undang ataupun peraturan pemerintah sebagai kebijakan yang harus ditaati oleh semua pelaku jasa konstruksi dan menjadi acuan ataupun pedoman dalam melindungi tenaga kerja pada pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Namun sebelum mewajibkan masyarakat, terlebih dahulu Pemerintah





harus mensosialisasikan peraturan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek).

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu Subdit Konstruksi Berkelanjutan memberikan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan dan Kerja di setiap tahunnya. Pada 2016 ini Bimtek SMK3 sudah dijalankan ke beberapa daerah-daerah di Indonesia. Beberapa daerah yang sudah menjalankan Bimtek SMK3 ini diantaranya Bali, Palembang, Ternate, Makassar, Jambi, Lampung, Jayapura, Pontianak, Palangkaraya, dan seterusnya.

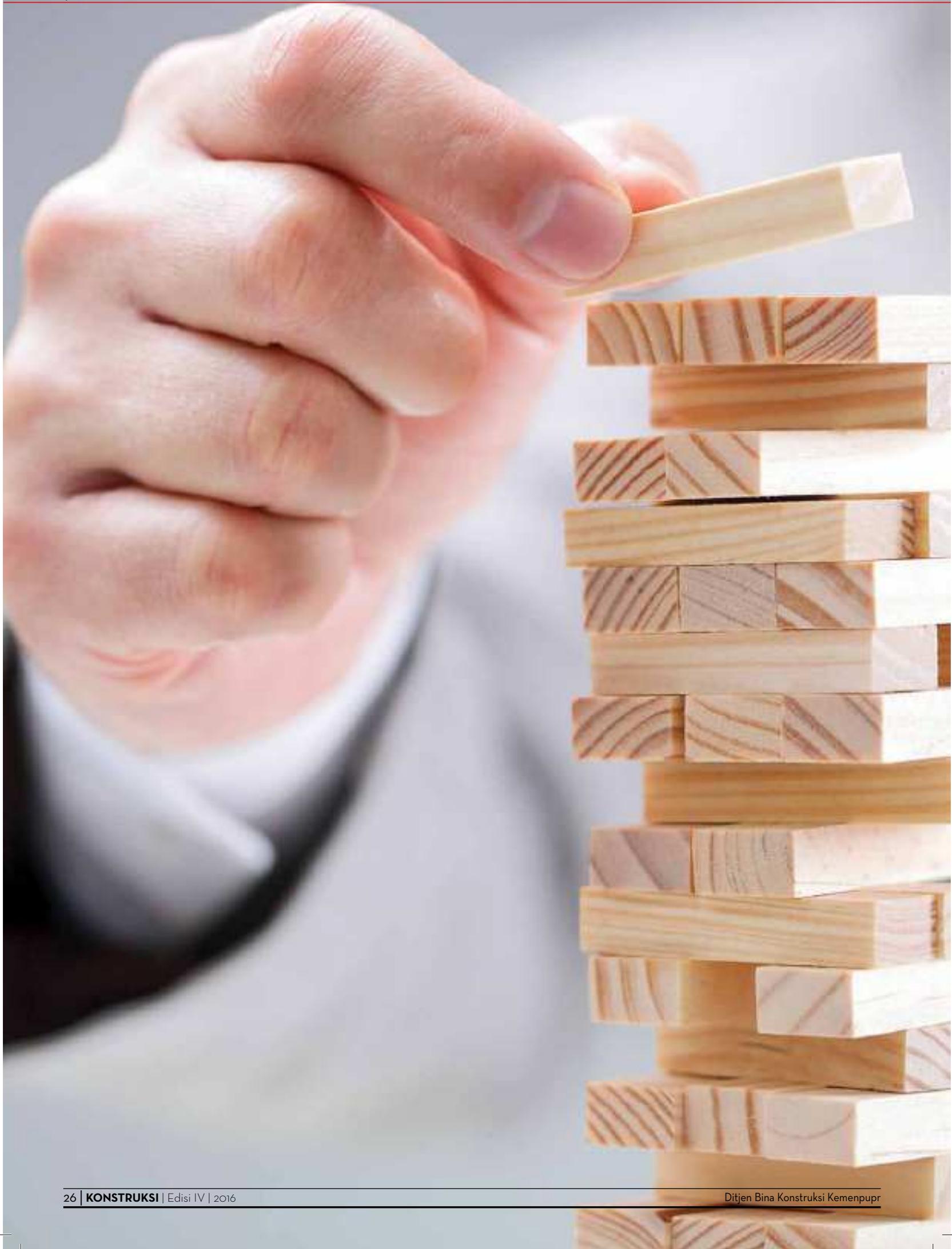
Pada Bimtek SMK3 ini bukan ilmu atau pengetahuan saja yang didapat tetapi attitude serta yang paling penting adalah peserta yang mengikuti Bimtek ini akan mendapatkan sertifikat K3 yang berguna untuk bisa menjadi Petugas K3 Bidang Konstruksi.

Bimtek SMK3 ini juga tidak hanya pada bagian konstruksi bangunan saja, melainkan konstruksi jalan, jembatan, dan bendungan. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengoptimalkan implementasi gerakan budaya SMK3 di sektor konstruksi Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR berkomitmen memastikan K3 dijalankan secara maksimal pada proyek konstruksi bidang pekerjaan umum.

Dengan penerapan SMK3, diharapkan dapat mengeliminasi resiko kecelakaan kerja, karena kecelakaan kerja hanya akan merugikan penyedia, pengguna jasa, dan masyarakat. Selain itu juga menciptakan konstruksi yang handal, efektif, efisien serta produk konstruksi yang berkualitas. Dengan demikian konstruksi di Indonesia akan semakin kompeten dan berdaya saing tinggi.■



**Melihat tingginya dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja di proyek konstruksi, maka aspek keselamatan kerja sudah seharusnya menjadi perhatian utama semua pihak**



# Manajemen Risiko Sebagai Key Driver Iklim Investasi Infrastruktur

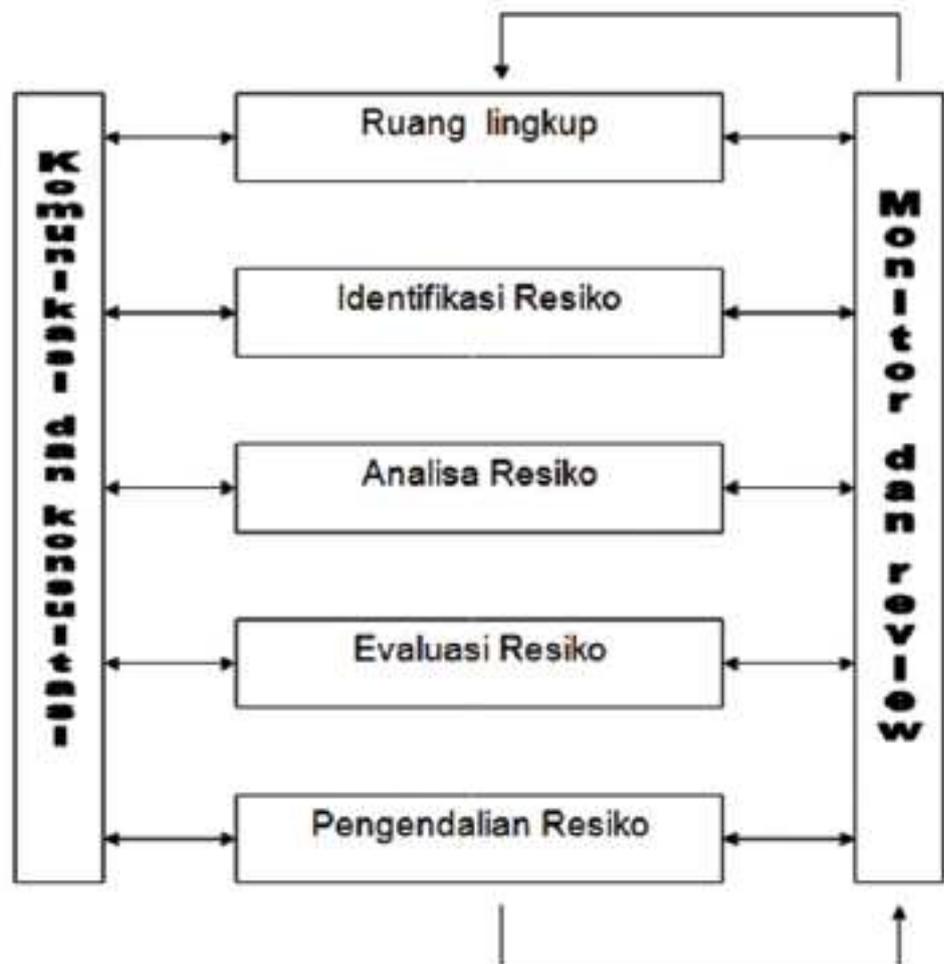


Decky Rahadian F

Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur telah mengalami perkembangan yang positif sebagai salah satu alternatif dalam penyediaan infrastruktur di banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satu nilai lebih dari penerapan skema KPBU ini adalah pengurangan dana swasta sebagai sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan melalui perjanjian konsesi dengan pihak pemerintah. Di samping itu, salah satu faktor yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan

skema KPBU adalah adanya asumsi bahwa penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU akan memberikan Value for Money (VFM) yang lebih besar dibandingkan dengan metode konvensional yang menggunakan dana Pemerintah secara penuh. Asumsi ini didorong oleh terdapatnya alokasi risiko yang optimal ketika infrastruktur dibangun dengan skema KPBU.

Perjanjian konsesi antara pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur bersifat *long term agreement*, mulai dari masa perencanaan, persiapan, konstruksi, operasi, pemeliharaan dan



Gambar 1. Tahapan Manajemen Risiko

serah terima. Perjanjian konsesi ini juga dilaksanakan dengan alokasi dana dalam jumlah besar sehingga perjanjian konsesi memiliki risiko yang kompleks yang mesti diperhitungkan secara matang. Pihak swasta selaku investor dalam skema KPBU akan menjadikan analisis risiko sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan apakah akan ikut berinvestasi dalam suatu proyek infrastruktur. Dengan analisis risiko, investor akan memperhitungkan tingkat kelayakan proyek berdasarkan tingkat pengembalian investasi tersebut. Dengan memperhatikan hal tersebut, manajemen risiko dalam skema KPBU menjadi salah satu *key driver* dalam perkembangan iklim investasi infrastruktur.

Salah satu faktor yang menjadikan analisis risiko sebagai *key driver* dalam penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU adalah terdapatnya nilai tersembunyi yang harus ditanggung dalam manajemen risiko. Nilai tersembunyi yang dimaksud adalah berupa dana cadangan yang harus disiapkan dalam rencana mitigasi risiko

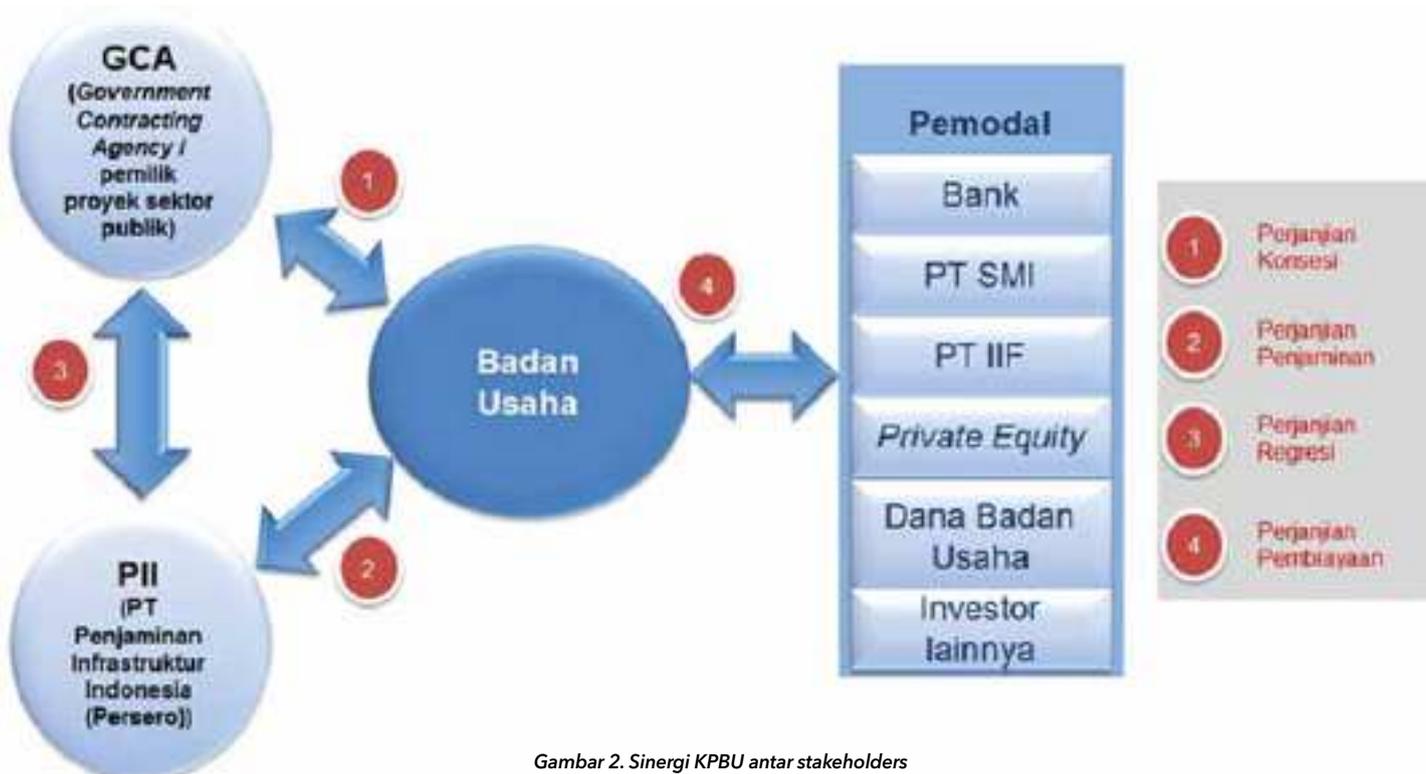
risiko kepada pihak yang paling memiliki kemampuan optimal dalam mengelolanya. Risiko tersebut dapat ditanggung salah satu pihak yang mampu, ditanggung bersama, dan/atau dialihkan kepada pihak ke tiga (asuransi). Ada pun untuk alokasi risiko yang ditanggung pemerintah, Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang dalam hal ini adalah PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) akan melakukan penilaian secara ketat terkait penjaminan risiko agar proyek terselenggara tepat waktu, biaya, dan sasaran. Proses *assessment* risiko tersebut selanjutnya akan menentukan besaran alokasi dana penjaminan oleh pemerintah yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas fiskal pemerintah di masa akan datang melalui perjanjian regresi yang ditandatangani antara *Government Contracting Agency*/wakil pemerintah (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama/PJPK) dengan PT. PII.

Pengaruh risiko pada iklim investasi infrastruktur sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah. Pada Permen PPN/

Badan Usaha (KPBU) (Morallos & Amekudzi, 2008); (Infrastructure Ontario, 2007); (HM Treasury, 2003a); (National Treasury, 2004); (DTF SV, 2001a)).



**Dengan analisis risiko, investor akan memperhitungkan tingkat kelayakan proyek. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam skema KPBU menjadi salah satu key driver dalam perkembangan iklim investasi infrastruktur.**



Gambar 2. Sinergi KPBU antar stakeholders

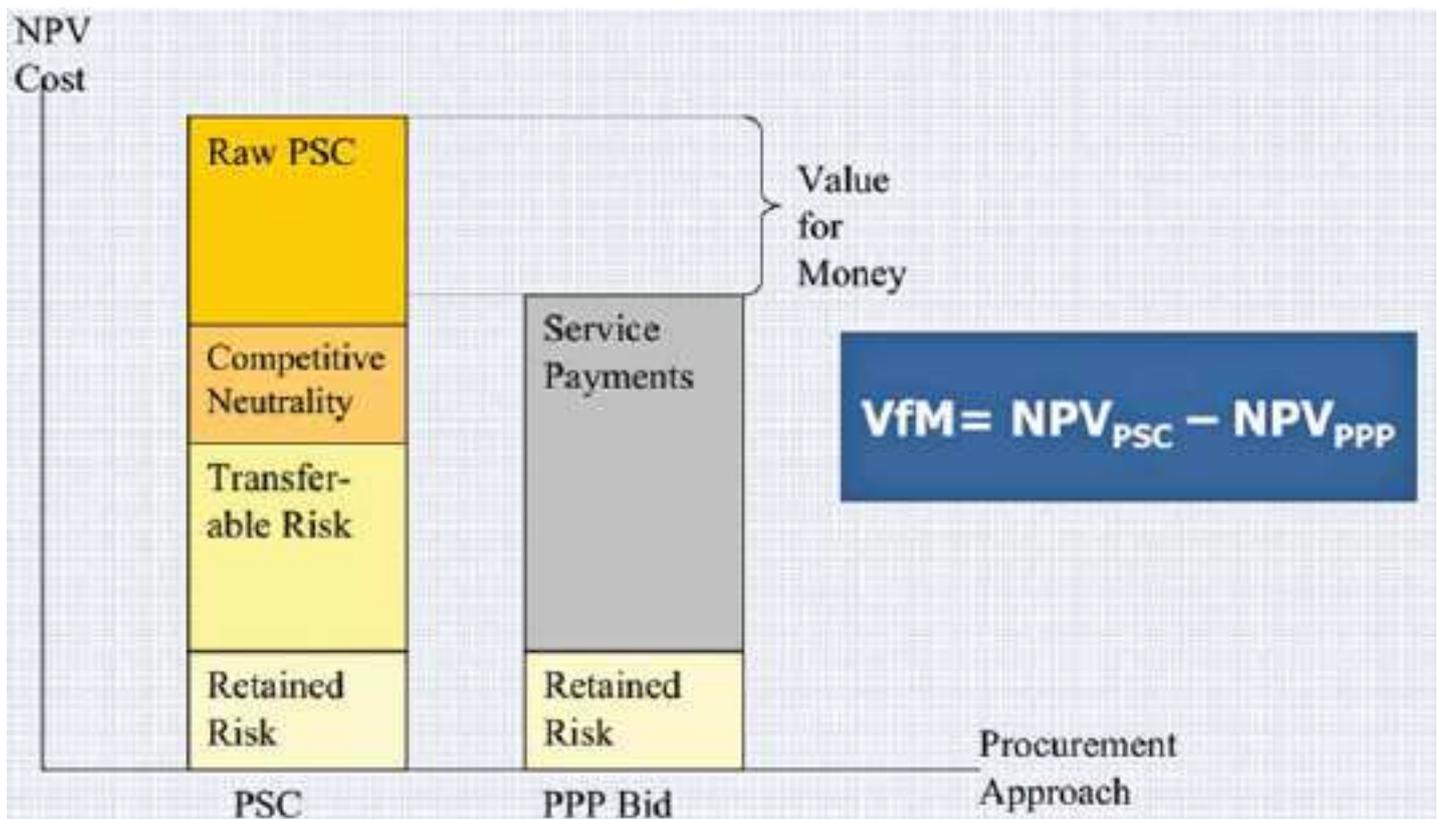
proyek infrastruktur skema KPBU. Nilai tersembunyi ini juga menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kelayakan proyek secara tidak langsung, yang berikutnya akan menjadi dasar pertimbangan besaran jaminan atau bentuk dukungan pemerintah dalam suatu proyek infrastruktur.

Aspek penting dalam manajemen risiko adalah bagaimana mengalokasikan

Bappenas No.4 Tahun 2015 dinyatakan bahwa pada saat studi pendahuluan harus dilakukan analisis *Value for Money* (VfM) sebagai dasar pengajuan penyiapan proyek KPBU. Nilai VfM sendiri menurut berbagai sumber ditentukan oleh pengadaan tradisional menggunakan PSC (*Public Sector Comparator*) dengan pengadaan PPP (*Public Private Partnership*)/Kerjasama Pemerintah

Dalam perhitungan VfM sesuai gambar 3, *Competitive Neutrality* diperoleh dengan melakukan:

- Identifikasi perbedaan pendekatan akuntansi pada perhitungan finansial antara pemerintah dengan badan usaha;
- Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan ke perhitungan PPP Bid;
- Nilai net advantage tanpa ada nilai sisa;



Gambar 3. Perhitungan Value for Money

d. Perhitungan *neutrality* termasuk *discounted rate* selama masa proyek.

*Transferrable risks/retained risks* dihitung dengan melakukan :

- Identifikasi risiko;
- Alokasi risiko yang paling optimum;
- Menjumlahkan nilai risiko dari hasil identifikasi dan alokasi, kemudian dihitung NPV.

Raw PSC sendiri terdiri dari biaya investasi ditambah dengan jumlah biaya pemeliharaan bersih setelah dikurangkan dengan penerimaan (Morallos & Amekudzi, 2008).

Jika memperhatikan teori VfM sesuai dengan gambar 3 di atas, *transferrable risk* (risiko yang ditransfer) menjadi salah satu variable PSC. Risiko ini diberikan kepada pihak yang mampu, di mana terdapat opsi untuk mentransfer risiko tersebut kepada badan usaha. Dalam perhitungan PPP Bid pada gambar 3, *transferrable risk* dan *competitive neutrality* kurang lebih akan dikonversi menjadi jumlah pembayaran kepada swasta/*concessionaire* dalam skema KPBU.

Memperhatikan fakta-fakta di atas terlihat jelas betapa pentingnya manajemen risiko dalam investasi infrastruktur khususnya dengan skema KPBU. Risiko-risiko tersebut umumnya bersifat historis, sebagian bersifat umum, dan sebagian lainnya bersifat khusus. Karena sifatnya yang

repetisi manajemen risiko dapat ditangani melalui sebuah basis data mitigasi risiko. Basis data harus dibangun berdasarkan hasil identifikasi risiko yang jelas dan komprehensif disertai komitmen semua stakeholder terkait untuk menggunakan database tersebut dalam rencana investasi infrastruktur skema KPBU. Dalam manajemen risiko tersebut, pola mitigasi risiko secara

umum harus disepakati semua pihak, kecuali untuk kasus-kasus khusus. Ada pun, hasil perhitungan *transferrable risk* dan *retained risk* yang ada dalam manajemen risiko yang sudah disepakati selanjutnya dimasukkan dalam perhitungan *Public Sector Comparator* (PSC) untuk menghitung pola investasi dan pembiayaan dalam perencanaan proyek melalui perhitungan *Value for Money*. ■



# Pentingnya Bimtek SMK3 Bagi Pengguna dan Penyedia

 Nizar Gilang

**S**istem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Sistem Manajemen K3 (SMK3) dibutuhkan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efektif dan produktif. Hampir seluruh perusahaan menerapkan SMK3 demi terciptanya tempat kerja yang aman, efektif dan produktif.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu Subdit Konstruksi Berkelanjutan memberikan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan dan Kerja di setiap tahunnya. Pada 2016 ini Bimtek SMK3 sudah dijalankan ke beberapa daerah-daerah di Indonesia. Beberapa daerah yang sudah menjalankan Bimtek SMK3 ini diantaranya Bali, Palembang, Ternate, Makasar, Jambi, Lampung, Jayapura, Pontianak, Palangkaraya dll.

Belakangan ini maraknya tentang kepentingan keselamatan dalam bekerja konstruksi menjadi landasan bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mengedepankan bahwa perlunya Bimbingan bagi pengguna dan penyedia jasa perihal SMK3 tersebut.

Pada Bimtek SMK3 ini bukan ilmu atau pengetahuan saja yang didapat tetapi attitude serta yang paling penting adalah peserta yang mengikuti Bimtek ini akan mendapatkan sertifikat K3 yang berguna untuk bisa menjadi Petugas K3 Bidang Konstruksi.

Bimtek SMK3 ini juga tidak hanya pada bagian konstruksi bangunan saja, melainkan konstruksi jalan, jembatan, dan bendungan.

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk mengoptimalkan implementasi gerakan budaya SMK3 di sektor konstruksi Indonesia. Direktorat Jenderal Bina



Konstruksi Kementerian PUPR merupakan pembina konstruksi yang akan memastikan K3 dijalankan secara maksimal pada proyek konstruksi bidang pekerjaan umum.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) gencar mengkampanyekan zero accident. Dengan diterapkannya SMK3, diharapkan dapat mengeliminasi resiko kecelakaan kerja, karena kecelakaan kerja hanya akan merugikan penyedia, pengguna jasa, dan masyarakat. Selain itu juga menciptakan konstruksi yang efektif dan efisien serta produk konstruksi yang berkualitas. Dengan begitu konstruksi Indonesia akan semakin kompeten dan berdaya saing tinggi. ■



DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT



## PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019 TERKAIT TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA BERSERTIFIKAT

MENGHASILKAN **10.000** ORANG  
INSTRUKTUR/ASESOR PELATIHAN KONSTRUKSI.

MENGHASILKAN **50.000** ORANG  
INSINYUR BARU UNTUK BIDANG KONSTRUKSI YANG BERSERTIFIKAT.

MENGHASILKAN **200.000** ORANG  
TEKNISI BERSERTIFIKAT.

MENGHASILKAN **500.000** ORANG  
TENAGA TERAMPIL BERSERTIFIKAT.



**"TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA,  
TERAMPIL DAN HANDAL, PASTI!"**

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Gedung Utama Lt. 10 Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Telp/Fax. 021-7266640 / 021-72797848 | [www.binakonstruksi.pu.go.id](http://www.binakonstruksi.pu.go.id) | email : [hukumdatakompu.djtk@gmail.com](mailto:hukumdatakompu.djtk@gmail.com)



# DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

## PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019

### 200 Kerjasama strategis

Dengan K/L, Pemda, PT, LPJK, Asosiasi, BUJK, Proyek, Masyarakat

### 10.000 Orang

Jumlah instruktur/asesor pelatihan konstruksi

### 50.000 Orang

Jumlah insinyur baru konstruksi bersertifikat

### 200.000 Orang

Jumlah teknisi bersertifikat

### 500.000 Orang

Jumlah tenaga terampil bersertifikat

### 30%

Penggunaan beton pracetak

### 40%

Pekerjaan konstruksi yang menerapkan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

### 125 BUJK

Peningkatan BUJK ke Kualifikasi Besar

### Rp 15 Triliun

Ekspor jasa konstruksi ke luar negeri

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gedung Utama Lt. 10 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Tlp/Fax. 021-7266640 / 021-72797848

  
**KITA**  
Bersama  
Membangun